

**TRANSFORMASI UNI EROPA:
PROSPEK KERJASAMA KAWASAN PASCA BREXIT**

Andrias Darmayadi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112-116

Email : andredarma@gmail.com

Abstract

United Kingdom is the nation that has a high asset in Western Europe region and in European Union. Economic capabilities among the member states are slightly different that caused the benefit overlapping that gained. This case triggered United Kingdom to withdraw from European Union that further known as Brexit. This phenomenon is motivated by the strong public opinion and referendum indicator on June 23, 2016. In writing this journal the author writes a thought about the Transformation of the European Union with the implications of the Prospect of Cooperation of Western Europe Region Post Brexit in the future. This paper contains some of the core essence of the introduction, problem formulation, and theoretical framework by indicating the theory of regionalism and the theory of neoliberalism in order to reach the scientific aspect and the detail of the topic discussed.

Keywords: *Brexit, Referendum, European Union, United Kingdom*

Abstrak

Inggris merupakan negara yang memiliki aset tinggi dikawasan Eropa barat dan di Uni Eropa. Kapabilitas ekonomi diantara negara anggota pun sangat berbeda sekali dan menyebabkan tumpang tindih terkait keuntungan yang didapatkannya. Hal ini memicu Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa, yang kemudian disebut Brexit. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh kuatnya opini publik dan indikator referendum pada 23 Juni 2016. Dalam penulisan jurnal ini penulis menuliskan suatu pemikiran mengenai Transformasi Uni Eropa dengan implikasi Prospek Kerjasama Kawasan Eropa Barat Pasca Brexit dimasa depan. Tulisan ini memuat beberapa inti pokok dari pendahuluan, rumusan masalah, kerangka teori dengan mengindikasikan teori regionalism dan teori neoliberalisme guna menjunjung aspek keilmiah dan kedetailan topik yang dibahas.

Kata Kunci : Brexit, Referendum, Uni Eropa, Inggris.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bermula setelah perang dunia kedua, muncul keinginan masyarakat Eropa untuk mengembalikan perekonomian dan menyatukan negara-negara di Eropa pasca perang di kawasan tersebut, sehingga pada 18 April 1951 terbentuklah “*European Coal and Steel Community* (ECSC) yang didirikan oleh enam negara pemakrassa, enam negara tersebut diantaranya Belgia, Prancis, Italia, Luxemburg, Belanda dan Jerman melalui penandatanganan perjanjian *Treaty of Paris* pada April 1951. Hingga pada tanggal 25 Maret 1957 nama tersebut diubah dengan *European Economic Community* (EEC) dengan harapan terciptanya pasar bersama. *Common market* (pasar bersama) adalah tahap integrasi suatu wilayah atau negara-negara dimana pergerakan barang dagang, jasa, modal dan penduduk dibebaskan secara bertahap sampai tidak ada lagi hambatan, dan sekarang dikenal dengan nama Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 1 Juli 2013 telah memiliki 28 negara anggota. Perjanjian Maastricht pada 1992 merupakan tonggak awal didirikannya nama Uni Eropa.

Dalam hal ini, Inggris memiliki keputusan nasional untuk tidak menandatangani perjanjian “*The Maastricht*”

yang mengharuskan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa untuk menggunakan mata uang Euro. Pada tahun 1991, Inggris mengajukan klausul-klausul yang mengemukakan bahwa, Inggris akan terus menggunakan mata uangnya sendiri yakni Poundsterling, hal ini dilakukan Inggris karena Inggris memiliki motif politik lain yakni, Inggris menginginkan dirinya untuk menjadi penyeimbang negara-negara di Eropa, hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa mata uang Inggris pada dasarnya telah stabil di dunia internasional. Selain itu, Inggris juga tidak mau menandatangani perjanjian Schengen. Perjanjian Schengen merupakan perjanjian yang dibuat oleh sejumlah negara Eropa untuk menghapuskan pengawasan perbatasan di antara mereka.

Di awal pembentukan Uni Eropa, Inggris menolak untuk bergabung dengan Uni Eropa. Inggris lebih tertarik untuk menjalankan hubungan bilateral dengan sejumlah mantan koloninya yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Pada tahun 1960an pandangan Inggris mulai berubah, saat itu Inggris mulai menyadari pentingnya menjalani kerjasama yang erat dengan negara – negara tetangganya di Eropa. Hingga pada akhirnya di tahun 1973, Inggris resmi menjadi anggota dalam Uni Eropa meskipun ada beberapa permasalahan tertentu yang terjadi di dalam domestik Inggris sendiri.

Dengan bergabungnya Inggris kedalam Uni Eropa, telah membawa keuntungan bagi Inggris antara lain mendapatkan kemudahan akses ekspor dan impor, serta pengurangan hambatan *tariff* bagi sistem perdagangan di kawasan Eropa khususnya bagian barat. Seiring dengan keanggotan Inggris yang memperlihatkan perbedaan kentara dengan negara anggota Uni Eropa yang lain, maka ini memicu evaluasi dan opini publik terkait nasib Inggris di Uni Eropa. Opini tersebut mendorong terjadinya referendum (proses pemungutan suara sebuah keputusan) pada 23 Juni 2016.

Referendum ini adalah inisiasi dari David Cameron, pemimpin Partai Konservatif, yang menjanjikan dilaksanakannya sebuah jajak pendapat segera setelah ia terpilih pada pemilu 2015 lalu. Cameron menjanjikan referendum ini untuk menenangkan kegaduhan di dalam partainya, dimana terbentuk dua faksi dalam Partai Konservatif: yang ingin meninggalkan UE dan yang ingin tetap di UE. Krisis kapitalisme telah memecah kelas borjuasi Inggris secara garis besar menjadi dua kubu, antara yang percaya bahwa mereka bisa menyelesaikan krisis dengan keluar dari UE, dan yang percaya bahwa jalan terbaik adalah tetap di dalam UE.¹

Brexit akan memberikan dampak baru pada hubungan Uni Eropa dan Inggris, dan akan berpengaruh terhadap posisi keduanya di dunia. Uni Eropa sedang memasuki krisis yang paling serius di dalam sejarahnya. Ini membuat banyak orang mempertanyakan keberadaannya di masa depan.

1.2. Rumusan Masalah

Maka dari itu berdasarkan pemaparan dari latar belakang untuk mempermudah kajian permasalahan yang akan diangkat, dirumuskan permasalahan bagaimana prospek kerjasama kawasan Eropa Barat pasca Brexit?

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa dan meramalkan suatu kejadian ataupun fenomena, sebuah teori didukung melalui sekumpulan data yang terbentuk kemudian menjadi sebuah fakta. Untuk menjawab rumusan masalah diatas maka penulis menguraikan fenomena tersebut melalui beberapa teori pendukung

a/lain-lain/8610-analisa-brexit-dan-masa-depan-uni-eropa.html. Diakses pada 15 Mei 2018.

¹ Sumber ini didapat dari <https://www.militanindonesia.org/internasional/erop>

2.1. Konsep Regionalisme

Menurut Joshep Nye, regionalisme merupakan kumpulan sejumlah negara tertentu yang tergabung dalam hubungan geografis dan dalam level interdependensi tertentu.² Di sisi lain, regionalisme merupakan sebuah unit kerja sama kawasan atau suatu wilayah tertentu. Di mana, kerja sama regional berkaitan erat dengan kerja sama yang berbasis pada kawasan untuk mencapai puncak, yakni integrasi dan dalam hal ini yaitu integrasi kawasan Eropa dalam wadah Uni Eropa. Akar integrasi Eropa ditelusuri kembali pada kombinasi faktor - faktor spesifik dan tatanan politik internasional, distribusi kekuasaan antar negara di kawasan Eropa, dan politik dalam negeri dengan kondisi di Perancis dan Jerman yang berlaku di Eropa barat pada awal tahun 1950an.³

² Louise Fawcett, 2000. *Regionalisme in Historical Perspective*, dalam Fawcett, L & Hurrell, A, eds. *Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order*. Oxford: Oxford University Press. Hal 11.

³ Fort, Bertrand dan Weber, Douglas. 2006. *Regional Integration in East*

Perubahan integrasi Eropa barat pada pertengahan tahun 1980an adalah hasil dari sebuah aliansi antara perusahaan transnasional Eropa yang diwakili oleh perkumpulan industrialis dan komisi Eropa.⁴

Dengan demikian, regionalisme dapat berkembang dari sebuah bentuk kesadaran atau komunitas (*soft regionalism*) kemudian mengarah pada konsolidasi kelompok dan jaringan untuk menjadi sebuah grup yang lebih formal antar negara (*hard regionalism*). Di sisi lain, regionalisme mengandung arti *policy* dan *project* dengan jelas dapat menjalankan aktivitas pada level negara.

2.2. Konsep Neoliberal

Neoliberalisme memiliki beberapa asumsi dasar yang *pertama*, adalah Hukum pasar, kebebasan bagi modal, barang dan jasa, sehingga pasar bisa mengatur dirinya sendiri agar gagasan “tetesan ke bawah” dapat mendistribusikan kekayaan. Juga mencakup upaya agar tenaga kerja tak diwakili serikat buruh, dan menyingkirkan

Asia and Europe: Convergence or Divergence. USA: Routledge. Hal 291.

⁴ Bornschier, Volker. 2000. *State – Building in Europe: The Revitalization of Western European Integration*. UK: Cambridge University Press. Hal 1.

semua hambatan yang menghalangi mobilitas modal, seperti peraturan – peraturannya. Kebebasan tersebut harus diberikan oleh negara atau pemerintah jadi pasarlah yang berkuasa dan penentu. *Kedua*, Mengurangi pembelanjaan publik bagi pelayanan – pelayanan sosial, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. *Ketiga*, Deregulasi, agar kekuatan pasar bisa bekerja menurut mekanisme aturannya sendiri. *Keempat*, Mengubah persepsi baik tentang publik dan komunitas menjadi individualisme dan tanggung jawab individual.

Pada dasarnya neoliberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh ideologi neoliberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar. Sehingga ketika suatu negara mengalami suatu fenomena, neoliberalisme memberikan beberapa penjelasan tentang penyebabnya.⁵

⁵ Eko Prasetyo, 2014. *Kapitalisme dan Neoliberalisme, Ekonomi Politik*. Jurnal Al-Manaar, Edisi I, hal 4.

3. PEMBAHASAN

3.1. Faktor - faktor yang mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa

3.1.1. Pengaruh United Kingdom Independence Party (UKIP) dalam menuntut keluarnya Inggris dari Uni Eropa

Referendum pertama kali dikampanyekan oleh partai anti Uni Eropa yaitu United Kingdom Independence Party sejak kemunculan pertama partai tersebut. Setelah Partai Konservatif memenangkan suara mayoritas pada *General Election* Mei 2015, Perdana Menteri David Cameron telah melakukan beberapa negosiasi dengan Uni Eropa sebelum akhirnya memutuskan untuk mengadakan referendum sebelum akhir 2017 dengan desakan yang mayoritas terus datang dari politisi Partai UKIP (United Kingdom Independence Party).⁶

United Kingdom Independence Party adalah partai yang muncul dengan isu menentang keanggotaan Inggris di Uni

⁶ Hunt, Alex, "UKIP : The story of the UK Independence Party's rise", BBC News, diakses dari <http://www.bbc.com/news/uk-politics-21614073>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2018

Eropa. Partai ini pertama kali muncul pada tahun 1993 saat Inggris masih dipimpin Perdana Menteri Theresa May. UKIP memiliki pandangan Anti-Uni Eropa, sejak awal dibentuk oleh Profesor Alan Sked dari London School of Economics yang berkampanye menentang Maastricht Treaty tahun 1991. Sked mendirikan UKIP pada tahun 1993, setelah Inggris meratifikasi Maastricht Treaty, perjanjian yang merupakan pendirian Uni Eropa. Partai ini menuntut Inggris untuk tidak menyetujui pemusatan kekuatan “Uni Eropa” yang satu sesuai dengan isi perjanjian Maastricht. Saat kemunculannya, UKIP mengusung program anti Imigran dan anti Uni Eropa sebagai wujud protes atas keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Walaupun tergolong partai yang baru muncul, tetapi partai ini telah menjadi ancaman besar bagi partai Konservatif dan Partai Buruh menjelang pemilu tahun 2015. Partai ini secara konsisten mengalami peningkatan suara dari tahun ke tahun. tidak hanya pada parlemen Inggris akan tetapi partai ini juga merupakan partai yang berpengaruh di parlemen Uni Eropa sendiri.

Dari beberapa aspek bidang yang dikampanyekan, kampanye utama UKIP adalah agar Inggris keluar dari Uni Eropa dan mengakhiri politik "pintu terbuka" terhadap para imigran, terutama yang

berasal dari negara-negara Uni Eropa. Isu imigrasi memang merupakan salah satu isu penting bagi pemilih dan UKIP menggunakan isu tersebut untuk menarik simpati masyarakat Inggris agar mendukungnya.

A. Referendum Inggris Tahun 2016

Referendum Brexit kedua kali ini dilaksanakan pada 23 Juni 2016. Dengan pertanyaan “Apakah Inggris harus melanjutkan keanggotaannya di Uni Eropa atau tidak”. Referendum diikuti oleh 71,8 % pemilih yang terdiri dari warga negara Inggris yang berumur 18 tahun keatas termasuk orang yang berkewarganegaraan Inggris yang terdapat di Ireland dan Commonwealth, yang terdiri dari 53 negara termasuk Australia, Canada, India, dan Afrika Selatan⁷. Anggota dari *House of Lords* juga ikut memilih.

⁷Sumber resmi hasil referendum brexit, <http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a-journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-referendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoral-commission-in-manchester> diakses pada 15 Mei 2018.

Referendum sendiri merupakan proses jajak pendapat (pemungutan suara) yang dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Sehingga hasil dari referendum tersebut menjadi suatu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya oleh suatu negara. Menurut data dari *Electoral Commission of EU Referendum*, sebanyak 48,1% (16,141,241) suara menjawab “tetap di Uni Eropa” untuk tetap menginginkan Inggris di Uni Eropa sedangkan 51,9% (17,410,742) menjawab “keluar dari Uni Eropa” untuk mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa. Hasil referendum adalah Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Hasil voting referendum bervariasi di setiap wilayah United Kingdom. Pada wilayah pusat kota besar seperti London, Scotland, dan Northern Ireland dimenangkan oleh *Remain*. Sisanya dimenangkan oleh kubu *Leave*. Dapat dilihat jika masyarakat di kota-kota besar cenderung menyetujui adanya integrasi dan keuntungan ekonomi dari Uni Eropa. Sedangkan masyarakat di kota-kota kecil cenderung kontra terhadap Uni Eropa.

Terdapat suara atau argumen-argumen yang mewakili dan menguatkan bahwa adanya opini publik yang terbentuk dalam

rakyat Inggris. Berikut klasifikasi argumen-argumen dari para pendukung pro Uni Eropa:

a. Argumen pertama datang dari David Cameron yang mengatakan bahwa “*voting leave would leave Britain a permanently poorer country in every sense and reduce its global influence.*” *Cameroon warns* argumen Cameroon dimaksudkan bahwa dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa maka Inggris akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara maju dalam bidang perekonomian, serta Inggris akan kehilangan pengaruh terhadap dunia Internasional. Hal ini tentu mengancam keberlangsungan kehidupan negara tersebut, sehingga David Cameron pada tahun 2015 berani untuk mengampanyekan suaranya untuk tetap pada keanggotaan Uni Eropa, bahkan Cameroon juga berjanji bersedia mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri apabila referendum menghasilkan keputusan untuk meninggalkan Inggris pada pemilu tahun 2015.

b. Selanjutnya, Perdana Menteri pertama Skotlandia Nicola Sturgeon berargumen “*voting to leave the European union would be a catastrophically damaging decision*” Skotlandia merupakan salah satu negara berdaulat yang mendukung Inggris untuk tetap pada keanggotaan Uni Eropa, dari Perdana Menteri pun menyetujui dan berargumen

seperti tersebut, maksud dari argumen Nicola Sturgeon bahwasannya terlalu beresiko bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa.

c. Selain para tokoh politik, salah satu *entrepreneur* Inggris Richard Branson mengatakan “*Leaving the European Union not one of the risks i would want the UK to take-not as an investor, not as father and not as a grandfather*” sebagai salah satu pelaku bisnis dalam negara Inggris, Richard Branson sama sekali tidak menginginkan akan Inggris keluar dari Uni Eropa, hal ini tentu terkait dengan keberlangsungan investasi yang kemudian dapat merugikan para pelaku bisnis di Inggris itu sendiri, mengingat banyak sekali negara ataupun *private sector* yang sangat tertarik untuk berinvestasi ke negara besar seperti Inggris.

Sementara para pendukung pro-brexit turut menyuarakan argumennya, diantaranya:

a. Nigel Farage seorang pemimpin dari *UK Independence party* mengatakan “*member of parliament should make Britain’s laws not unelected old men in Brussels-who we can not vote for or remote*” dari argumen beliau menyatakan bahwa anggota parlemen harus membentuk sebuah Undang-undang yang mengikat negaranya,

sehingga kedaulatan Inggris tetap berada pada negaranya, bukan tunduk terhadap organisasi supranasional seperti Uni Eropa, karena peraturan-peraturan yang mengikat yang dibentuk oleh dewan Eropa.

b. “*We can take back the billions we give to the European Union-get rid of the regulations-forge trade deals and partnerships with nations across the globe, if Britain leaves the European Union-the conservative minister argues*” Michael Gove (*Justice Secretary*) argues berkaitan dengan argumen Michael Gove, yang dalam argumennya menyimpulkan bahwa setelah Inggris lepas dari hegemoni Uni Eropa, Inggris dapat mendapatkan peluang keuntungan dalam hubungan perdagangan dan penawaran dalam dunia Internasional. Inggris secara bebas diperbolehkan untuk bekerjasama dagang oleh negara manapun tanpa terikat perjanjian dagang Uni Eropa. Kemudian, diharapkan peluang keuntungan yang tercipta akan semakin besar dibandingkan Inggris masih tetap bergabung pada Uni Eropa.

c. “*I know what we gives the European union but not what it gives us back*” Bernie Ecclestone (*Formula One CEO*) says, pelaku bisnis seperti Bernie Ecclestone sekalipun juga tidak mau ketinggalan untuk menyuarakan pendapatnya, beliau juga mengerti

seberapa besar kontribusi yang diberikan Inggris terhadap Uni Eropa, akan tetapi menurut beliau Uni Eropa tidak memberikan sesuatu perubahan yang signifikan terhadap negaranya.

Dari beberapa argumen diatas, merupakan sebuah bukti yang dapat mendukung adanya opini publik yang terbentuk dari masyarakat. Meskipun ada beberapa pandangan dari rakyat yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi pandangan melalui sebuah analisis wacana tersebut cukup kuat untuk mendukung dan melatarbelakangi Inggris keluar dari Uni Eropa.

3.1.2. *European Monetary Union* (EMU) Kebijakan Uni Eropa yang Merugikan Inggris

Hubungan Inggris dan Uni Eropa tidak selamanya mulus dan bahkan sering terjadi ketimpangan antara dua kebijakan yang berbeda, seperti dalam *European Monetary Union* (EMU) yang merupakan kebijakan ekonomi bersama dan aturan bagi negara anggota untuk menggunakan mata uang tunggal (Euro) yang dipakai oleh seluruh negara anggota. Saat ini EMU merupakan

suatu hal yang legal yang paling di kenal dan signifikan di Eropa barat⁸.

European Monetary Union merupakan bagian dari *European Economic and Monetary Union* yang diuncurkan pada tahun 1992. Ada 2 motif utama dalam menuju EMU, yaitu ekonomi dan politik. Kasus ekonomi berdasarkan pada logika yang sama untuk membangun pasar bersama : integrasi ekonomi merupakan elemen yang sangat diminati karena dengan ini, dianggap bahwa penggunaan sumberdaya yang merupakan faktor produksi akan lebih efisien ketikan dialokasikan ke pasar dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Sedangkan atas dasar politik, argumen untuk mengintensifkan integrasi ekonomi adalah dengan memperkuat hubungan ekonomi nasional yang akan menumbuhkan interaksi dan kerjasama yang lebih besar antar pemerintah nasional⁹.

Dalam konteks ini, beberapa negara anggota Uni Eropa telah menempuh integrasi lebih lanjut dengan mengadopsi Euro sebagai mata uang negara tersebut kecuali Inggris dan Denmark. Inggris telah memilih keluar dari

⁸ Hancock, Kathleen J. 2009. *Regional Integration: Choosing Plutocracy*. New York: Palgrave Macmillan. Hal 24.

⁹ Kruse, D.C. 1980. *Monetary Integration in Western Europe: EMU, EMS and Beyond*. USA: Butterworths. Hal 18.

pengadopsian Euro sejak awal dengan memilih “*option out*”.

Sebuah penciptaan mata uang tunggal berarti dimulainya kebijakan moneter yang terpusat di Eropa yang harus dijalankan oleh negara anggotanya. Kebijakan moneter akan diatur oleh sebuah bank sentral baru yaitu Bank Sentral Eropa. Bank ini nantinya yang mengatur kebijakan moneter luas khususnya, peraturan tentang suku bunga. Negara anggota akan kehilangan kekuatannya untuk mengatur kebijakan moneter nasionalnya secara terpisah dan independen. Negara anggota harus menyerahkan kebijakan tersebut kepada Bank Sentral Eropa.

Pemerintah Inggris tidak ingin melepaskan kontrol kebijakan suku bunga negaranya ke Uni Eropa yang akan terjadi ketika suatu negara mengadopsi sistem Euro. Inggris memproteksi suku bunganya dengan mempertahankan tingkat kontrol investasi asing yang diliberalisasi untuk mencegah Poundsterling dari titik tinjau intervensi.¹⁰

3.2. Prospek Kerjasama Kawasan Eropa Barat Pasca Brexit

Peristiwa Brexit telah membawa hal yang signifikan bagi dunia dan khususnya Uni Eropa juga Inggris. Skala dari negara – negara Eropa Barat dalam ekonomi global dianggap

terlalu kecil untuk mengejar tujuan stabilisasi keuangan otonom atau makroekonomi dengan pengecualian dari Inggris. setiap negara harus mentransfer kebijakan moneternya pada Bank Sentral Eropa dan tunduk pada peraturan kerangka kerja. Kerangka tersebut membatasi pilihan fiskal dan anggaran, yaitu kriteria Maastricht dan ketentuan yang muncul dari pertumbuhan dan stabilitas pakta yang diperebutkan. Meski Inggris tidak berpartisipasi dalam mata uang bersama, pola perdagangan mereka saat ini menjamin sebuah pemantauan ketat terhadap kebijakan fiskal negara anggota euro dan strategi moneter bank sentral Eropa.¹¹

Dalam periode kontemporer ini, Brexit sangat berpengaruh sekali pada kredibilitas masa depan Uni Eropa dan kerjasama kawasan Eropa barat, antara lain :

- Terdapat sebuah blok yang secara politis lebih kohesif dalam pengambilan keputusan, sehingga daya distribusi kekuasaannya tidak merata

¹⁰ Ibid Hal 114

¹¹ Sweden, Willfred. 2006. *Federalism and Regionalism in Western Europe: A comparative and Thematic Analysis*. New York: Palgrave Macmillan. Hal 106.

- Aspek neoliberal menjadi kurang fungsi dan kurang terbuka terhadap globalisasi

- Secara Ideologis, Brexit menempati ruang sempit dengan tidak melihat aspek substansial dari perdagangan, dengan tidak mengelaborasi pentingnya aspek FDI didalamnya.

- Dibatasi oleh dukungan publik yang stabil namun pada tingkat yang lebih rendah

- Ketidakstabilan politik jangka menengah, sehingga menghalangi inisiatif politik Uni Eropa¹².

4. KESIMPULAN

Inggris cenderung lebih kooperatif baik dengan negara lain maupun organisasi Internasional, tidak terkecuali pada Uni Eropa. Inggris memiliki sejarah panjang dengan Uni Eropa bahkan sebelum Inggris bergabung dengan keanggotaan Uni Eropa pada Januari 1973. Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa dilatarbelakangi krisis minyak pada tahun 1973, sehingga terjadi perlambatan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara Inggris. Dengan bergabungnya Inggris dengan Uni

Eropa diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki keadaan ekonomi negara tersebut. Sejak awal bergabungnya Inggris dengan organisasi Uni Eropa ini, beberapa dari elemen masyarakat tidak setuju terhadap bergabungnya Inggris ke Uni Eropa. Perdebatan tersebut datang dari pelaku bisnis, partai politik dan lembaga-lembaga lainnya. Hingga pada tahun kedua keanggotaan Inggris di Uni Eropa, Inggris menggelar referendum pertama kali pada tanggal 6 Juni 1975.

Keputusan Inggris untuk meninggalkan keanggotaan Uni Eropa dinilai sangat serius dan riskan. Mengingat Inggris adalah aset kuat dan sangat substansial bagi Uni Eropa. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga akan membawa pengaruh atau dampak buruk bagi keanggotaan negara Eropa lainnya dan terhadap prospek kerjasama Eropa barat dalam tatanan dunia, selain itu transformasi kredibilitas Uni Eropa pun akan terlihat menurun dan bahkan memburuk, dilihat dari berkurangnya GNP dan kurangnya aspek FDI dalam proses perdagangan internasional setelah Brexit.

¹² Featherstone, Kevin. The Future of EU After Brexit. Dalam presentasi European Institute.

DAFTAR PUSTAKA**Sumber Buku**

- Bornschier, Volker. 2000. *State – Building in Europe: The Revitalization of Western European Integration*, UK: Cambridge University Press.
- Fort, Bertrand dan Weber, Douglas. 2006. *Regional Integration in East Asia and Europe: Convergence or Divergence*. USA: Routledge.
- Hancock, Kathleen J. 2009. *Regional Integration: Choosing Plutocracy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kruse, D.C. 1980. *Monetary Integration in Western Europe: EMU, EMS and Beyond*. USA: Butterworths.
- Louise Fawcett, 2000. *Regionalisme in Historical Perspective*, dalam Fawcett, L & Hurrell, A, eds.
- Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order*. Oxford: Oxford University Press. Tahun dan pengarang tidak diterbitkan.
- Sweden, Willfred. 2006. *Federalism and Regionalism in Western Europe: A comparative and Thematic Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.

Sumber Jurnal

- Eko Prasetyo, 2014. *Kapitalisme dan Neoliberalisme, Ekonomi Politik*. Jurnal Al-Manaar, Edisi I.
- Featherstone, Kevin. *The Future of EU After Brexit*. Dalam presentasi European Institute. Tahun tidak diterbitkan.

Sumber Internet

- Hunt, Alex, "UKIP : The story of the UK Independence Party's rise", BBC News, diakses dari <http://www.bbc.com/news/uk-politics-21614073>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2018
- <https://www.militanindonesia.org/internasional/eropa/lain-lain/8610-analisa-brexit-dan-masa-depan-uni-eropa.html>. Diakses pada 15 Mei 2018.
- Sumber resmi hasil dari referendum brexit, <http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releases-referendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoral-commission-in-manchester> diakses pada 15 Mei 2018.